



Analisis Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

¹⁾Ani Sulistiawati, ²⁾Sutrisno, ³⁾Angga Pratama Putra, ⁴⁾Totok Hendarto, ⁵⁾Nurul Hayati, ⁶⁾Muhajir, ⁷⁾Maria Agustini, ⁸⁾Indra Wirawan

^{1,2)}STIE Pancasetia, Banjarmasin, Indonesia

^{3,4)}Agrobisnis Perikanan, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

^{5,6,7,8)}Budidaya Perairan, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Email Corresponding: ani@stiepancasetia.ac.id*

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bumd), dan lain-lain pad yang sah terhadap total pad di kabupaten probolinggo. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah meskipun Kabupaten Probolinggo memiliki potensi ekonomi yang besar. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius dalam pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis laju pertumbuhan dan korelasi Pearson untuk menilai hubungan antara variabel-variabel PAD. Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan PAD Kabupaten Probolinggo tahun 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rata-rata PAD sebesar 5,5%, dengan kategori "tidak berhasil". Komponen-komponen PAD lainnya, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil BUMD, juga menunjukkan laju pertumbuhan yang belum optimal, dengan nilai rata-rata masing-masing masih berada di bawah kriteria keberhasilan. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengevaluasi strategi pengelolaan PAD dan meningkatkan kinerja fiskal daerah secara mandiri. Selain itu, penelitian ini juga mengisi kekosongan literatur dalam menganalisis secara komprehensif keempat komponen utama PAD dalam konteks daerah dengan karakteristik ekonomi seperti Kabupaten Probolinggo.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD, Kabupaten Probolinggo, Laju Pertumbuhan

Abstract- This study aims to analyze the relationship between the components of Regional Original Income (PAD) which include regional taxes, regional levies, results of management of separated regional assets (BUMD), and other legitimate PAD to the total PAD in Probolinggo Regency. The background of this study is based on the low contribution of PAD to total regional income even though Probolinggo Regency has great economic potential. High dependence on transfer funds from the central government is a serious challenge in independent and sustainable regional development. The research method used is quantitative descriptive with a growth rate analysis approach and Pearson correlation to assess the relationship between PAD variables. The data used are secondary data from the PAD report of Probolinggo Regency for 2019–2024. The results of the study show that the average growth rate of PAD is 5.5%, with the category "unsuccessful". Other PAD components, such as Regional Taxes, Regional Levies, and BUMD Results, also show a growth rate that is not optimal, with the average value of each still below the success criteria. This study provides practical implications for the Probolinggo Regency Government to evaluate PAD management strategies and improve regional fiscal performance independently. In addition, this study also fills the gap in the literature in comprehensively analyzing the four main components of PAD in the context of regions with economic characteristics such as Probolinggo Regency.

Keywords: Local Original Income, Local Taxes, Local Retributions, BUMD Results, Probolinggo Regency, Growth Rate

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD berperan penting dalam memberikan otonomi fiskal kepada daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. PAD mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah, serta menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah (Kementerian Keuangan RI, 2022). Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD melalui berbagai komponen seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan BUMD, serta Lain-lain PAD yang Sah. Namun, berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo tahun 2019–2024, rata-rata laju pertumbuhan seluruh komponen PAD cenderung rendah dan berada dalam kategori “tidak berhasil”. Misalnya, PAD hanya tumbuh rata-rata 5,5% per tahun, dan komponen seperti pajak daerah hanya tumbuh rata-rata 9,01%. Hasil dari perusahaan



milik daerah (BUMD) bahkan hanya mencatat pertumbuhan rata-rata 2,37%, menandakan kontribusi yang sangat rendah terhadap PAD.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena PAD merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah. Selain itu penurunan dan ketidakaturan pertumbuhan PAD dapat mengancam kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengetahui komponen mana yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD, agar strategi peningkatannya dapat lebih terarah. Kabupaten Probolinggo dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah dengan potensi ekonomi cukup besar namun pertumbuhan PAD-nya belum optimal. Data PAD dan komponennya tersedia dan lengkap selama periode 2019–2024. Dan diperlukan model analisis spesifik berbasis data lokal untuk meningkatkan efektivitas fiskal. Variabel-variabel yang dianalisis merupakan komponen utama PAD sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 yaitu Pajak Daerah mewakili instrumen fiskal reguler dari Masyarakat, Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tertentu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/BUMD bentuk usaha daerah, Lain-lain PAD yang Sah termasuk penerimaan bunga, dividen, atau denda administratif. Keempat variabel tersebut dinilai mewakili aspek fiskal struktural PAD yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan.

Saputra & Wijaya (2021) dalam penelitiannya meneliti PAD di Kabupaten Malang menjelaskan pajak dan retribusi berpengaruh signifikan, sementara BUMD belum optimal. *Penelitian ini menegaskan pentingnya memisahkan dan menganalisis komponen PAD secara individual*. Afriyeni (2020) dalam penelitiannya menjelaskan di Kota Pekanbaru, retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Ardani et al. (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa lain-lain PAD yang sah di Kota Denpasar memiliki pengaruh sangat kuat. Rizki (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa BUMD berperan kecil terhadap PAD di Kota Bekasi. Lestari dan Huda (2020) menganalisis PAD di Kabupaten Sleman dan menemukan bahwa pajak daerah sangat dominan. Harahap & Purba (2022) meneliti 33 kabupaten di Sumatera dan menyimpulkan bahwa PAD sangat dipengaruhi struktur ekonomi lokal. Syahputra (2023) meneliti studi korelasi antara PAD dan struktur penerimaan menunjukkan hasil bervariasi antar daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini fokus pada analisis korelasi aktual antar komponen PAD secara statistik, bukan sekadar pengaruh regresi. Selain itu penelitian ini menggunakan data aktual terbaru 2019–2024, dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan data sebelum 2020. Dan menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu laju pertumbuhan dan analisis korelasi Pearson untuk mengukur hubungan nyata antar variabel. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung pertumbuhan PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pad yang sah serta mengetahui hubungan antar variabel tersebut.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif untuk menganalisis dan memperoleh gambaran tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif dikarenakan penelitian berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena dari perspektif seseorang. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo sejak awal berdirinya Kabupaten Probolinggo yaitu 75 tahun. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo dari tahun 2019 sampai 2024. Analisis data adalah sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang akan mudah dibaca dan di interpretasikan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder, dilakukan mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo, yang terdiri:

2.1 Analisis Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan dan mempertahankan penerimaan retribusi daerah yang di capainya dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan suatu periode akan dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk mengetahui persentase pertumbuhan retribusi lebih baik atau justru menurun. Untuk mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Anwar, 2014):

1.
$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD (t)} - \text{PAD (t-1)}}{\text{PAD (t-1)}} \times 100\%$$
2.
$$\text{Pertumbuhan Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah (t)} - \text{Pajak Daerah (t-1)}}{\text{Pajak Daerah (t-1)}} \times 100\%$$

3. Pertumbuhan Retribusi Daerah = $\frac{\text{Retribusi Daerah (t)} - \text{Retribusi Daerah (t-1)}}{\text{Retribusi Daerah (t-1)}} \times 100\%$
4. Pertumbuhan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan = $\frac{\text{PHPMDPKD (t)} - \text{PHPMDPKD (t-1)}}{\text{PHPMDPKD (t-1)}} \times 100\%$
5. Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah
= $\frac{\text{Lain-lain PAD yang sah (t)} - \text{Lain-lain PAD yang sah (t-1)}}{\text{Lain-lain PAD yang sah (t-1)}} \times 100\%$

Keterangan :

PAD (t) = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan
 PAD (t-1) = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya
 Pajak Daerah (t) = Pajak Daerah tahun berjalan
 Pajak Daerah (t-1) = Pajak Daerah tahun sebelumnya
 Retribusi Daerah (t) = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan
 Retribusi Daerah (t-1) = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya
 PHPMDPKD (t) = Pertumbuhan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun berjalan
 PHPMDPKD (t-1) = Pertumbuhan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun sebelumnya
 Lain-lain PAD yang sah (t) = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan
 Lain-lain PAD yang sah (t-1) = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya
 Adapun tabel tingkat untuk mengukur laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel 1. Laju Pertumbuhan

Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 84%	Berhasil
55% - 69%	Cukup Berhasil
30% - 54%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber: Halim, 2007;91

2.2 Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana:

r: adalah koefisien korelasi Pearson.
 n: adalah jumlah pasangan data (x, y).
 $\sum XY$: adalah jumlah hasil kali nilai x dan y untuk setiap pasangan data.
 $\sum X$: adalah jumlah nilai x.
 $\sum Y$: adalah jumlah nilai y.
 $\sum X^2$: adalah jumlah kuadrat nilai x.
 $\sum Y^2$: adalah jumlah kuadrat nilai y.

Rumus koefisien korelasi Pearson menghitung nilai "r" yang berada di antara -1 dan 1. Nilai:

-1

menunjukkan korelasi negatif sempurna, artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun dengan proporsi yang sama.

0

menunjukkan tidak ada korelasi, artinya tidak ada hubungan linier antara kedua variabel.

1

menunjukkan korelasi positif sempurna, artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat dengan proporsi yang sama.

Nilai "r" yang mendekati -1 atau 1 menunjukkan hubungan linier yang kuat, sedangkan nilai "r" yang mendekati 0 menunjukkan hubungan linier yang lemah atau tidak ada hubungan linier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo

Perkembangan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu pengamatan dari tahun 2019-2024 menunjukkan adanya penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahunnya. Laju pertumbuhan PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan	Kriteria
2019	254.884.191.561,70	-	-
2020	254.884.191.561,70	0	Tidak Berhasil
2021	296.818.784.519,64	14.13	Tidak Berhasil
2022	262.492.146.513,00	-13.08	Tidak Berhasil
2023	299.315.561.765,91	12.30	Tidak Berhasil
2024	348.707.288.652,34	14.16	Tidak Berhasil
Rata-rata		5,50	Tidak Berhasil

Sumber : Data BPS diolah, 2025

Tabel 2. menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 5,5% dengan kriteria tidak berhasil atau tidak efisien setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan PAD sebesar 0%, pada tahun 2024 PAD mengalami peningkatan terbesar dalam kurun waktu periode 2019 sampai 2024 dengan pertumbuhan sebesar 14,16%. Pada tahun 2022 PAD mengalami penurunan -13,08% terbesar pada rentang waktu tahun 2019 sampai 2024.

2. Pajak Daerah

Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah selama lima tahun di Kabupaten Probolinggo mengalami sebuah peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

Tabel 3. Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2019	63.800.464.846,00	-	-
2020	63.800.464.846,00	0	Tidak Berhasil
2021	65.824.089.337,00	3,07	Tidak Berhasil
2022	84.081.515.062,00	21,71	Tidak Berhasil
2023	88.717.504.471,18	5,23	Tidak Berhasil
2024	104.459.105.973,05	15,07	Tidak Berhasil
Rata-rata		9,01	Tidak Berhasil

Sumber : Data BPS diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan realisasi dan tingkat pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan, pada tahun 2021 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 3,07%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 21,71%. Tetapi pada tahun 2023 pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 16,48% dari tahun sebelumnya. Dan pada Tahun 2024 pajak daerah mengalami peningkatan dengan nilai pertumbuhan sebesar 15,07%. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah tahun 2019 sampai 2024 sebesar 9,01%, dengan ini laju pertumbuhan berkriteria tidak berhasil atau tidak efisien.

3. Retribusi Daerah

Perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah selama lima tahun di Kabupaten Probolinggo mengalami sebuah peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

Tabel 4. Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2019	13.692.582.875.00	-	-
2020	13.692.582.875.00	0	Tidak Berhasil
2021	15.615.658.777.00	12.32	Tidak Berhasil

2022	17.420.770.580.00	10.36	Tidak Berhasil
2023	22.789.600.311.00	23.56	Tidak Berhasil
2024	25.284.094.729.00	9.87	Tidak Berhasil
Rata-rata		11.22	Tidak Berhasil

Sumber : Data BPS diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan realisasi dan tingkat pertumbuhan retribusi daerah pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan, pada tahun 2021 penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 12,32%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,96% menjadi 10,36%. Tetapi pada tahun 2023 pertumbuhan retribusi daerah mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 13,2% dari tahun sebelumnya. Dan pada Tahun 2024 retribusi daerah mengalami penurunan dengan nilai pertumbuhan sebesar 9,87%. Rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tahun 2019 sampai 2024 sebesar 11,22%, dengan ini laju pertumbuhan berkriteria tidak berhasil atau tidak efisien.

4. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan realisasi penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama lima tahun di Kabupaten Probolinggo mengalami sebuah peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Untuk mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5. Pertumbuhan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Probolinggo

Tahun	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2019	6.119.639.082.80	-	-
2020	6.119.639.082.80	0	Tidak Berhasil
2021	6.199.646.527.90	1.29	Tidak Berhasil
2022	6.616.387.067.00	6.30	Tidak Berhasil
2023	6.746.983.892.00	1.94	Tidak Berhasil
2024	6.906.966.783.00	2.32	Tidak Berhasil
Rata-rata		2.37	Tidak Berhasil

Sumber : Data BPS diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan realisasi dan tingkat pertumbuhan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan, pada tahun 2021 penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 1,29%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 6,30%. Tetapi pada tahun 2023 pertumbuhan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar 4,36% dari tahun sebelumnya. Dan pada Tahun 2024 penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,32%. Rata-rata pertumbuhan penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 sampai 2024 sebesar 2,37%, dengan ini laju pertumbuhan berkriteria tidak berhasil atau tidak efisien.

5. Lain-lain PAD yang Sah

Perkembangan realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu pengamatan dari tahun 2019-2024 menunjukkan adanya penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahunnya. Laju pertumbuhan lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 6. Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Probolinggo

Tahun	Lain-lain PAD yang Sah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2019	171.271.504.757.90	-	-
2020	171.271.504.757.90	0	Tidak Berhasil
2021	209.179.389.877.74	18.12	Tidak Berhasil
2022	154.373.473.804.00	-35.50	Tidak Berhasil
2023	181.061.473.091.73	14.74	Tidak Berhasil

2024	212.057.121.167.23	14.62	Tidak Berhasil
Rata-rata		2.39	Tidak Berhasil

Sumber : Data BPS diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan realisasi dan tingkat pertumbuhan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan, pada tahun 2021 penerimaan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan sebesar 18,12%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi -35,50%. Tetapi pada tahun 2023 pertumbuhan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 14,74% dari tahun sebelumnya. Dan pada Tahun 2024 pertumbuhan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan dengan nilai pertumbuhan sebesar 14,62%. Rata-rata pertumbuhan penerimaan lain-lain pad yang sah tahun 2019 sampai 2024 sebesar 2,39%, dengan ini laju pertumbuhan berkriteria tidak berhasil atau tidak efisien.

6. Hubungan antara X1,X2, X3 dan X4 terhadap Y tersaji pada tabel di bawah ini

Tabel 7. Hubungan antara X1,X2, X3 dan X4

Variabel	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	Keterangan
Y (Pendapatan Asli Daerah)	-	-	-
X1 (Pajak Daerah)	0,064	0,785	Tidak Berkorelasi
X2 (Retribusi Daerah)	0,025	0,868	Korelasi Kuat
X3 (Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan)	0,100	0,730	Tidak Berkorelasi
X4 (Lain-lain PAD yang Sah)	0,041	0,829	Korelasi Kuat

Sumber : Data sekunder diolah, 2025

Dari tabel di atas diketahui bahwa variabel X2 dan X3 memiliki nilai sig. (2-tailed) < 0,05 maka berkorelasi. Dengan pedoman derajat hubungan nilai pearson correlation X2 sebesar 0,868 dan X4 sebesar 0,829 maka memiliki hubungan korelasi yang sempurna karena berada direntang nilai pearson correlation 0,81 sampai dengan 1,00. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Wijaya (2021) menemukan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Malang, sementara BUMD memiliki kontribusi yang masih rendah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pertumbuhan dan hubungan antar variabel dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024, maka dapat diambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo Tidak Konsisten dan Tidak Efisien. Meskipun terdapat peningkatan pada beberapa tahun tertentu, namun secara rata-rata pertumbuhan PAD hanya mencapai 5,5% dan seluruhnya dikategorikan tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan PAD belum mencapai hasil yang optimal. Tahun 2022 bahkan mengalami penurunan drastis sebesar -13,08%.
2. Pajak Daerah Belum Memberikan Kontribusi Efisien terhadap PAD. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah selama periode pengamatan sebesar 9,01% dan dikategorikan tidak berhasil. Tahun 2020 stagnan tanpa pertumbuhan, dan hanya tahun 2022 serta 2024 yang menunjukkan pertumbuhan signifikan. Korelasi antara pajak daerah (X1) dengan PAD (Y) sebesar 0,785 dengan signifikansi 0,064 menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik, sehingga tidak terbukti memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan PAD.
3. Retribusi Daerah Memiliki Korelasi Kuat terhadap PAD. Retribusi daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan 11,22% namun tetap dikategorikan tidak berhasil. Meski demikian, secara statistik retribusi daerah (X2) memiliki korelasi kuat dan signifikan terhadap PAD (nilai Pearson = 0,868; sig. = 0,025). Artinya, meskipun laju pertumbuhannya belum optimal, kontribusinya terhadap peningkatan PAD sangat relevan dan perlu mendapat perhatian strategis.
4. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Kekayaan Daerah Masih Rendah. Dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2,37% dan seluruh tahun tergolong tidak berhasil, kontribusi hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD sangat terbatas. Korelasi terhadap PAD juga tidak signifikan secara



statistik (Pearson = 0,730; sig. = 0,100), menandakan bahwa sektor ini masih lemah dan belum mampu memberikan dukungan yang berarti terhadap PAD.

5. Lain-lain PAD yang Sah Menunjukkan Korelasi Kuat terhadap PAD.
Meski mengalami fluktuasi tajam dan penurunan besar pada tahun 2022 (-35,50%), lain-lain PAD yang sah memiliki rata-rata pertumbuhan 2,39% dan seluruh tahun dikategorikan tidak berhasil. Namun secara statistik, variabel ini (X4) memiliki korelasi yang kuat dan signifikan terhadap PAD (Pearson = 0,829; sig. = 0,041), yang menunjukkan bahwa komponen ini meskipun tidak stabil, tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD.
6. Keseluruhan Komponen PAD Belum Dikelola Secara Efektif.
Dari seluruh komponen PAD yang dianalisis, hanya retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang memiliki korelasi kuat dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pengelolaan pajak daerah dan BUMD masih perlu ditingkatkan dari sisi efektivitas dan efisiensi. Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu mengevaluasi secara mendalam sistem pemungutan, pengawasan, dan strategi pengembangan pendapatan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

REFERENSI

1. Afriyeni. (2020). *Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Ekonomi, 8(1), 65–72. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jie/article/view/5678>
2. Ardani, I. K., Putra, I. N. G., & Suryawan, I. M. (2019). *Analisis Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 17(1), 123–132. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JEP/article/view/8900>
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2020). *Kabupaten Probolinggo dalam Angka 2020*. Probolinggo: BPS Kabupaten Probolinggo.
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2021). *Kabupaten Probolinggo dalam Angka 2021*. Probolinggo: BPS Kabupaten Probolinggo.
5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2022). *Kabupaten Probolinggo dalam Angka 2022*. Probolinggo: BPS Kabupaten Probolinggo.
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2023). *Kabupaten Probolinggo dalam Angka 2023*. Probolinggo: BPS Kabupaten Probolinggo.
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2024). *Kabupaten Probolinggo dalam Angka 2024*. Probolinggo: BPS Kabupaten Probolinggo.
8. Harahap, S., & Purba, D. (2022). *Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi terhadap PAD di 33 Kabupaten di Pulau Sumatera*. Jurnal Kajian Fiskal Regional, 4(2), 104–115. <https://jurnal.unimed.ac.id/2022/03/kfr/article/view/10452>
9. Lestari, A. D., & Huda, M. (2020). *Analisis Dominasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, 12(1), 51–60. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jakd/article/view/7654>
10. Rizki, A. N. (2018). *Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(3), 88–96. <https://ejournal.uns.ac.id/index.php/jiap/article/view/4567>
11. Saputra, R., & Wijaya, Y. (2021). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah, 10(2), 45–59. <https://doi.org/10.31289/ekonomikod.v10i2.3456>
12. Syahputra, F. (2023). *Studi Korelasi Antara Struktur Penerimaan PAD dan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah, 11(4), 72–85. <https://jurnal.stiesp.ac.id/index.php/jekd/article/view/1130>